



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017 2022 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO KUALA



MARABAHAN, 2018



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/247/KUM/2018**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 2017-2022
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BARITO KUALA**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah setelah diverifikasi kemudian ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2017-2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022;

MEMUTUSKAN :

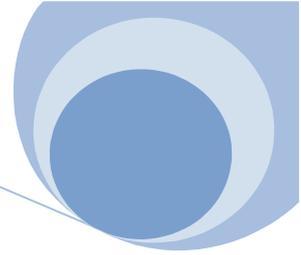
Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
- KEDUA** : Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
- KETIGA** : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi landasan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala.
- KEEMPAT** : Sistematika Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 disusun sebagai berikut :
- I. PENDAHULUAN
 - II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - IV. TUJUAN DAN SASARAN
 - V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - VIII. PENUTUP
- KELIMA** : Isi beserta uraian rencana strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 4 Juni 2018

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini memberikan gambaran tentang program-program dan kegiatan-kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala selama lima tahun mendatang yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD TAHUN 2017-2022 Kabupaten Barito Kuala.

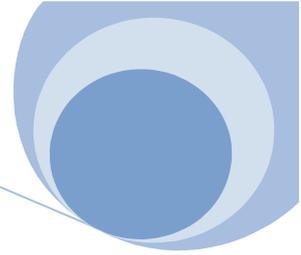
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini melalui upaya maksimal kami, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, untuk itu saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini.

Akhirnya, semoga memberikan manfaat.

Marabahan, 4 Juni 2018
KEPALA DINAS

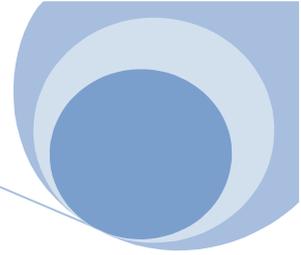
Drs.H.Samsul Arifin M.AP
NIP 19640823 198903 1015



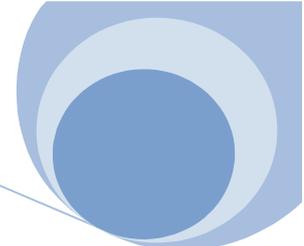
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISHUB	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dishub ...	7
2.1.1. Tugas	7
2.1.2. Fungsi	7
2.1.3. Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya DISHUB	10
2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tk Pendidikan ...	10
2.2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan	11
2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	11
2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi	12
2.2.5. Fasilitas Perlengkapan	12
2.3. Kinerja Pelayanan DISHUB	12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISHUB	13
2.4.1. Tantangan	13
2.4.2. Peluang	15
BAB III PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS DISHUB	16
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DISHUB	16
3.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis	16
3.1.2. Keseimbangan Lingkungan Internal dan	

Eksternal	22
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Terpilih	23
3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga	24
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25

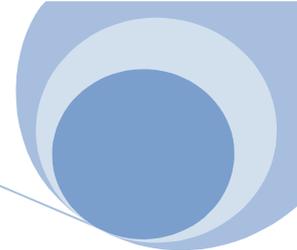


	3.5. Penentuan isu-isu Strategis	26
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	28
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
	5.1. Analisa Keterkaitan Lingkungan Strategis	31
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	37
BAB VII	KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	44
BAB VIII	PENUTUP	47



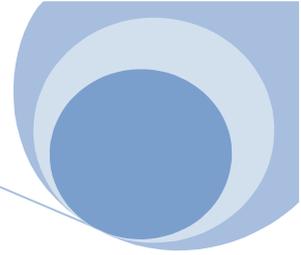
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjurangan	11
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	11
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf	12
Tabel 3.1. Matriks Kekuatan DISHUB	17
Tabel 3.2. Matriks Kelemahan DISHUB	18
Tabel 3.3. Matriks Peluang DISHUB	20
Tabel 3.4. Matriks Ancaman DISHUB	21
Tabel 3.5. Matriks Keseimbangan Lingkungan Strategis DISHUB	22
Tabel 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2017-2022	29
Tabel 5.1. Analisa Lingkungan Strategis DISHUB Kabupaten Barito Kuala	32
Tabel 5.2. Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis DISHUB Kabupaten Barito Kuala 2017-2022	36
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikator	38
Tabel 6.2. Indikator Kinerja Utama DISHUB Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022	43
Tabel 7.1. Indikator Kinerja DISHUB yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	44
Tabel 7.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISHUB Kabupaten Barito Kuala	45



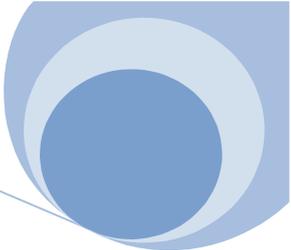
DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.	Bagan SOTK DISHUB Kabupaten Barito Kuala	9
--------	----	--	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2017-2022	48
Lampiran 2.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikator	49
Lampiran 3.	Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Barito Kuala	56



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik merupakan keinginan yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi public dewasa ini. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut adalah bahwa pemerintah daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LKIP). Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Barito Kuala salah satu instansi pemerintah daerah dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang Perhubungan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu



menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, maupun nasional.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas perhubungan (DISHUB) merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut diatas. Rencana Strategis ini merupakan suatu dokumen yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam ukuran waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan adalah :

1. Landasan Ideal : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Ketetapan MPR Nomor XI/ MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenamgan Provinsi sebagai Daerah Otonom

- 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
 13. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Barito Kuala adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua karyawan dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2017-2022.

- 
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan lima tahunan, untuk dijabarkan dalam rencana kerja tahunan.
 4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perhubungan (DISHUB) dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan (DISHUB) :

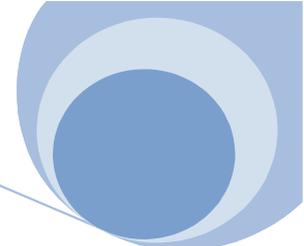
1. Memenuhi kebutuhan perubahan dalam lingkungan pemerintah yang semakin kompleks dan dinamis.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan pada masa depan.
5. Memudahkan para pemangku kepentingan untuk menghadapi masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan secara optimal.
7. Meningkatkan komunikasi antara pemangku kepentingan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan



BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISHUB

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DISHUB
 - 2.1.1. Tugas
 - 2.1.2. Fungsi
 - 2.1.3. Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya DISHUB
 - 2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 - 2.2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
 - 2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
 - 2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi
 - 2.2.5. Fasilitas Perlengkapan
- 2.3. Kinerja Pelayanan DISHUB
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISHUB
 - 2.4.1. Tantangan
 - 2.4.2. Peluang

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DISHUB
 - 3.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis
 - 3.1.2. Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SARANAN

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DISHUB YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISHUB

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DISHUB

DISHUB sebagai instansi pemerintah daerah yang bertugas di bidang Transportasi berdasarkan pada peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

2.1.1. Tugas

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten

2.1.2. Fungsi

Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, sungai dan penyeberangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, sungai dan penyeberangan.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di perhubungan darat, perhubungan laut, sungai dan penyeberangan.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat , perhubungan laut, sungai dan penyeberangan.

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi Perhubungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.3. Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan (DISHUB) terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas Perhubungan
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris DISHUB dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset,

2.1.3.1. Unsur Pelaksana :

- a. Bidang Perhubungan Darat yang terdiri dari Kepala Bidang Perhubungan Darat dibantu oleh Kepala Seksi Lalau Lintas Angkutan Jalan dan Kepala Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana.
- b. Bidang Perhubungan Laut Sungai dan Penyeberangan yang terdiri dari Kepala Perhubungan Laut Sungai dan Penyeberangan dibantu oleh Kepala Seksi Lalau Lintas Angkutan Laut Sungai dan Penyeberangan dan Kepala Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Laut Sungai dan Penyeberangan

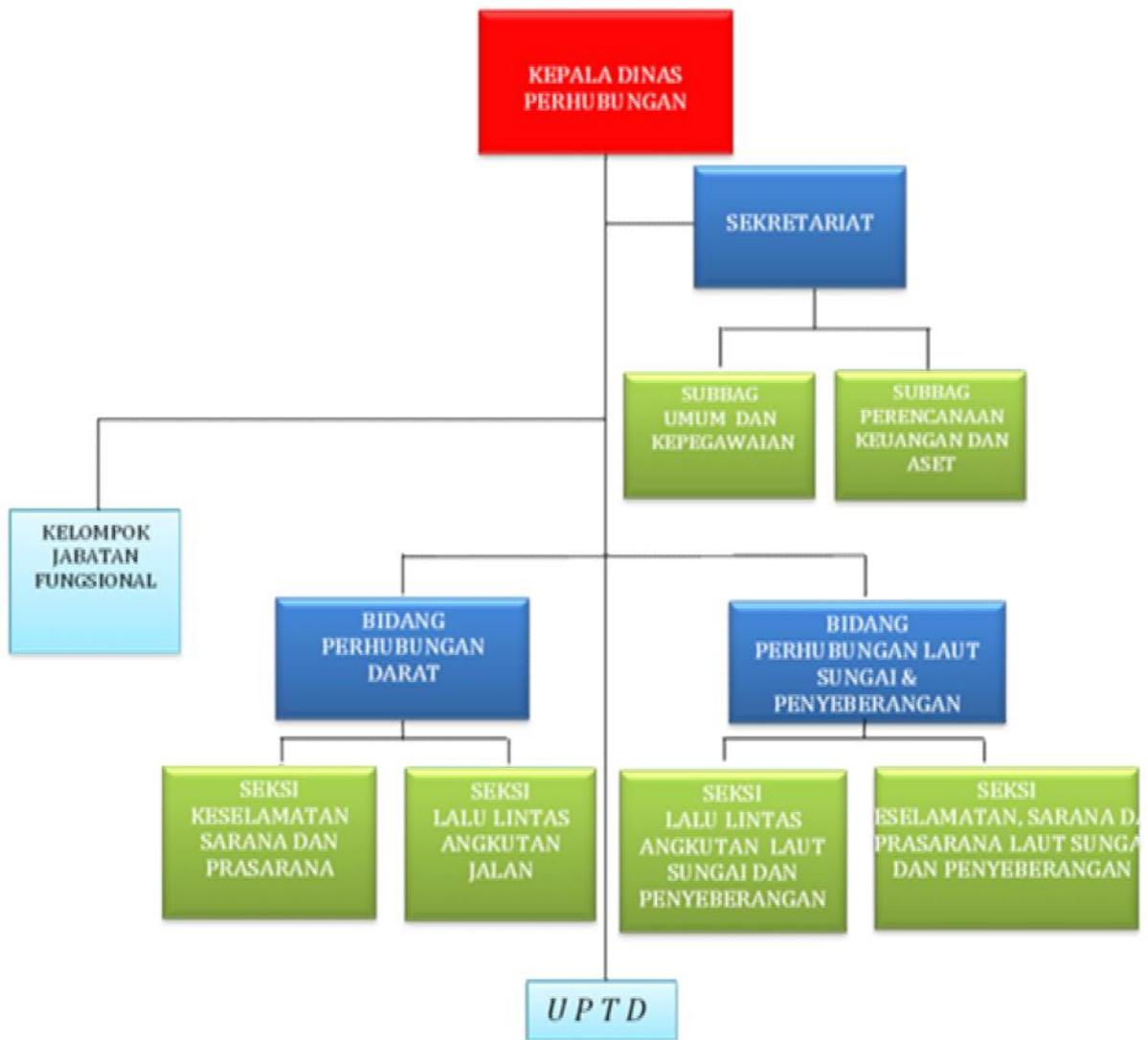
2.1.3.2. Kelompok Jabatan Fungsional :

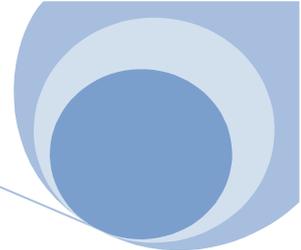
Kelompok Jabatan Fungsional hingga saat ini belum terisi meskipun secara struktur organisasi posisi ini tersedia.

2.1.3.3. Unit Pelaksana Tehnis daerah (UPTD) :

Unit Pelaksana Tehnis daerah (UPTD hingga saat ini belum terisi meskipun secara struktur organisasi posisi ini tersedia.

Gambar 2. 1. Bagan SOTK DISHUB Kabupaten Barito Kuala





2.2. Sumber Daya DISHUB

2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Secara keseluruhan jumlah pegawai di DISHUB Kabupaten Barito Kuala berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 18 orang pria dan 7 orang wanita yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan formal sebagaimana pada tabel 1 berikut.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Strata 3	- orang Pria dan - orang Wanita	0,00% 0,00%
2	Strata 2	1 orang Pria dan - orang Wanita	1,89% 0,00%
3	Strata 1	13 orang Pria dan 1 orang Wanita	24,53% 1,89%
4	Strata D III	4 orang Pria dan - orang Wanita	7,55% 4,00%
5	SLTA	31 orang Pria dan 1 orang Wanita	58,49% 1,89%
5	SLTP	2 orang Pria dan - orang Wanita	3,77% 0,00%
JUMLAH PNS		51 orang Pria dan 2 orang Wanita	95,23% 3,77%

2.2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Keadaan pegawai di DISHUB Kabupaten Barito Kuala yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan sebagaimana pada tabel 2.



Tabel 2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan.

No	Jenis Pelatihan Penjenjangan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Diklat Pim II	1 orang Pria dan - orang Wanita	1,88 -
2	Diklat Pim III	2 orang Pria dan - orang Wanita	3,77 -
3	Diklat Pim IV	4 orang Pria dan - orang Wanita	7,55 -
JUMLAH PNS		6 orang Pria dan 0 orang Wanita	11,52 -

2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Secara umum sebagian besar pegawai di DISHUB Kabupaten Barito Kuala adalah Golongan IV (empat) berjumlah 3 Orang (5,66%) Golongan III (tiga) berjumlah 20 orang (37,74 %), Golongan II (dua) berjumlah 28 (52,83) dan yang paling sedikit adalah Golongan I (satu) yang berjumlah 2 orang (3,77 %). Secara rinci keadaan pegawai berdasarkan golongan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Pangkat / Golongan	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang Pria - orang Wanita
2	Pembina Muda Tk. I (IV/b)	- orang Pria - orang Wanita
3	Pembina (IV/a)	2 orang Pria - orang Wanita
4	Penata Tk. I (III/d)	1 orang Pria - orang Wanita
5	Penata (III/c)	3 orang Pria - orang Wanita
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	3 orang Pria 1 orang Wanita
7	Penata Muda (III/a)	7 orang Pria - orang Wanita
8	Pengatur Tk. I (II/d)	5 orang Pria 1 orang Wanita
9	Pengatur (II/c)	15 orang Pria - orang Wanita
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	9 orang Pria - orang Wanita
10	Juru Muda Tk. I (I/b)	2 orang Pria - orang Wanita
Jumlah		51 orang Pria 2 orang Wanita

- 2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi Menduduki jabatan (Struktural dan fungsional (nonangka kredit) di DISHUB Kabupaten Barito Kuala terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No	Jabatan Eselon	Jumlah (orang)	Persentase
1	Esselon II.b	1 orang Pria dan - orang Wanita	1,88 -
2	Esselon III.a	- orang Pria dan - orang Wanita	- -
3	Esselon III.b	2 orang Pria dan - orang Wanita	3,77 -
4	Esselon IV.a	4 orang Pria dan - orang Wanita	7,55 -
5	Non Struktural/Fungsional Non Angka Kredit	44 orang Pria dan 2 orang Wanita	83,02 3,77
JUMLAH PNS		51 orang Pria dan 2 orang Wanita	96,23 3,77

- 2.2.5. Fasilitas Perlengkapan

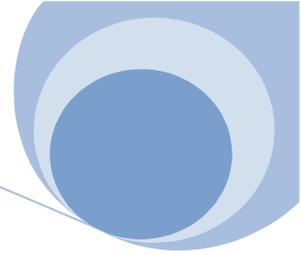
Fasilitas atau Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Daerah berupa :

1. Peralatan kantor dan mesin memadai
2. Gedung dan bangunan semi permanen,
3. Jaringan listrik dan air, telepon yang memadai
4. Aset tetap lainnya

- 2.3. Kinerja Pelayanan DISHUB

Adapun Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala yang mengacu pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kualayaitu :

1. Tersedianya Angkutan Umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan
2. Tersedianya terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.



1. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) pada jalan Kabupaten.
4. Tersedianya unit Pengujian Kendaraan bermotor bagi Kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
5. Tersedianya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

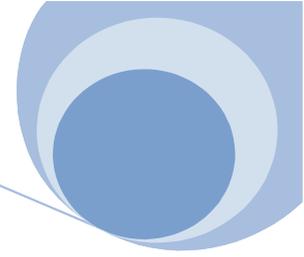
Tabel. 2.5. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan

No	Indikator kinerja sesuai Tupoksi (IKU)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi	
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Persentase Penurunan kecelakaan lalu lintas jalan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Penurunan kecelakaan lalu lintas jalan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100

Tabel. 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Barito Kuala

TABEL T-C 24

	Anggaran pada Tahun Ke- Rp0					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
alu	598.871.000	874.463.500	2.147.507.000	2.547.657.240	378.464.500	596.692.000	848.001.575	2.114.739.647	2.349.434.155	354.930.222	99,6	97,0	98,5	92,2	93,8	1.309.392.648	96,22
alu gai an.	513.180.000	876.847.500	827.735.000	522.850.800	806.864.500	505.210.000	792.822.032	826.775.875	432.016.328	802.463.125	98,4	90,4	99,9	82,6	99,5	709.495.560	94,17
	1.112.051.000	1.751.311.000	2.975.242.000	3.070.508.040	1.185.329.000	1.101.902.000	1.640.823.607	2.941.515.522	2.781.450.483	1.157.393.347	99,1	93,7	98,9	90,6	97,6	1.309.392.648	0



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISHUB

Keberhasilan DISHUB Kabupaten Barito Kuala dalam mengimplementasikan perannya sebagai Pelayanan di bidang Perhubungan aeraah tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan stakeholders baik itu SKPD maupun lembaga-lembaga non pemerintah, sehingga dapat diwujudkan rencana pembangunan daerah yang partisipatif, holistik dan berkelanjutan.

Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang, sedangkan disisi lain peluang pengembangan pelayanan DISHUB Kabupaten Barito Kuala masih terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif.

2.4.1. Tantangan

dengan pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala yang tentunya membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang transportasi, maka hal ini merupakan suatu tantang dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi baik bagi Dishub Kab Batola maupun stakeholder lainnya.

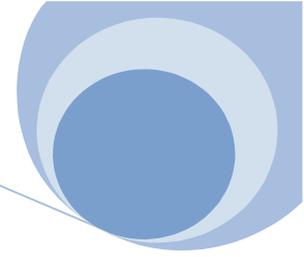
Tantangan yang paling menonjol adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, baik untuk jarak dekat, menengah maupun jarak jauh.

Untuk kebutuhan transportasi jarak dekat peluang ini sudah ditangkap dengan maraknya angkutan rakyat berupa sepeda motor ojek, maupun becak. Untuk jarak menengah nampaknya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dishub Kab Batola mengingat banyaknya penumpang angkutan umum yang beralih menggunakan sepeda motor sehingga cukup mempengaruhi kelangsungan usaha angkutan umum ini.

Begitu juga dengan moda transportasi lainnya, seperti moda angkutan sungai yang sudah mulai ditinggalkan oleh penggunanya, padahal seperti kita ketahui Kabupaten Barito Kuala memiliki sungai-sungai yang sangat layak digunakan untuk alur pelayaran transportasi sungai. Saat ini angkutan sungai hanya didominasi oleh angkutan barang, angkutan batubara dan angkutan penyeberangan.

2.4.2. Peluang

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan DISHUB Kabupaten Barito Kuala adalah Peluang pengembangan pelayanan Dishub Kab Batola dalam menangan masalah transportasi cukup terbuka. Hal ini dimungkinkan dengan strategi Dishub yang mencoba mengembangkan sarana angkutan umum massal, mendukung percepatan pembangunan kereta api, mendukung pembangunan Pengujian Kendaraan Bermotor.



BAB III

PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS DISHUB

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DISHUB

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

3.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis

Rencana Strategis DISHUB Tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal DISHUB. Pemahaman terhadap perubahan lingkungan strategis akan mendorong pelaksanaan program dan kegiatan DISHUB Tahun 2017-2022 secara efektif dan efisien dalam mendukung terwujudnya visi dan misi RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

3.1.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal

Analisa lingkungan internal DISHUB Kabupaten Barito Kuala dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti struktur organisasi, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana; serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran DISHUB dalam lima tahun mendatang (2017-



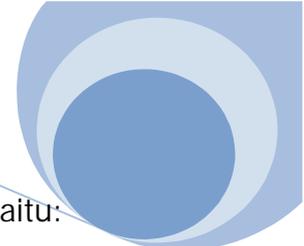
Analisa lingkungan internal di DISHUB meliputi identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, meliputi:

1. Kekuatan (Potensi) yang dimiliki di DISHUB, yaitu:
 - a) Tersedianya jumlah sumber daya manusia memadai;
 - b) Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai;
 - c) Tersedianya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan;

Tabel 3. 1. Matriks Kekuatan DISHUB

No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Tersedianya jumlah sumberdaya manusia memadai;	12,50	1	0,49
2	Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai	25,00	2	1,25
3	Tersedianya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan	62,50	5	2,91
	TOTAL	100,00		4,65

Catatan:
Skor diukur dari skala 1. Sangat kecil, 2. Kecil, 3. Sedang, 4. Besar dan 5. Sangat Besar



2. Kelemahan (kendala) yang ada di DISHUB, yaitu:
- a) Kurangnya Anggaran program dan kegiatan;
 - b) kurangnya sumber daya manusia Tehnis Perhubungan;
 - c) Kurangya sarana dan prasarana;

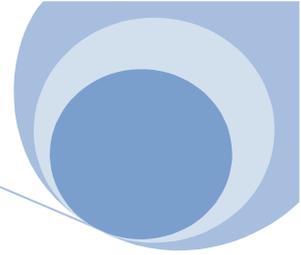
Tabel 3. 2. Matriks Kelemahan DISHUB

No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Kurangnya Anggaran program dan kegiatan	28,57	2	0,45
2	kurangnya sumber daya manusia Tehnis Perhubungan	28,57	2	1,01
3	Kurangya sarana dan prasarana	42,86	3	1,42
	TOTAL	100,00		2,87

Catatan:
Skor diukur dari skala 1. Sangat kecil, 2. Kecil, 3. Sedang, 4. Besar dan 5. Sangat Besar

3.1.1.2. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal

Identifikasi dan analisa lingkungan eksternal DISHUB Kabupaten Barito Kuala dilakukan untuk mencatat dan mengkaji peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan tujuan dan sasaran DISHUB dalam lima tahun mendatang (2017-2022). Dari hasil identifikasi dan analisa lingkungan eksternal, peluang dan ancaman yang harus dihadapi oleh DISHUB dalam menjalankan tupoksi adalah sebagai berikut:



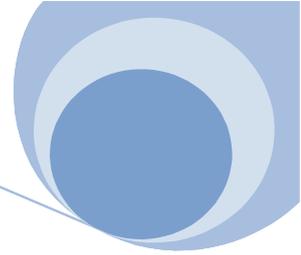
1. Peluang, yang tersedia bagi DISHUB, yaitu:
 - a) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran DISHUB dalam pelayanan transportasi;
 - b) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran DISHUB
 - c) Dukungan dari instansi terkait

Tabel 3. 3. Matriks Peluang DISHUB

No. Catatan	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Adanya peraturan yang mendukung peran DISHUB dalam pelayanan transportasi	42,86	3	0,45
2	Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran DISHUB	14,29	1	1,01
3	Dukungan dari instansi terkait	57,14	4	1,42
	TOTAL	114,29		2,87

Catatan:
Skor diukur dari skala 1. Sangat kecil, 2. Kecil, 3. Sedang, 4. Besar dan 5. Sangat Besar

2. Ancaman atau Tantangan, yang dihadapi DISHUB antara lain, yaitu:
 - a) Lemahnya koordinasi antar SKPD;
 - b) Meningkatnya tuntutan masyarakat akan fasilitas perhubungan;
 - c) Rendahnya disiplin masyarakat dalam berlaku lintas;



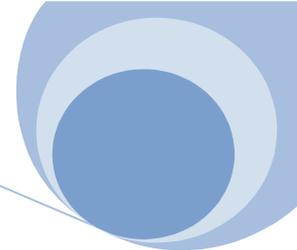
Tabel 3. 4. Matriks Ancaman DISHUB

No.	Indikator	Potensi (%)	Skor	Skor Tertimbang
1	Rendahnya disiplin masyarakat dalam berlaku lintas	28,57	2	1,53
2	Meningkatnya tuntutan masyarakat akan fasilitas perhubungan	28,57	2	0,45
3	Rendahnya Dukungan dari instansi terkait	42,86	3	1,82
	TOTAL	100,00		3,80

Catatan:
Skor diukur dari skala 1. Sangat kecil, 2. Kecil, 3. Sedang, 4. Besar dan 5. Sangat Besar

3.1.2. Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal

Berdasarkan hasil identifikasi lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan DISHUB, serta identifikasi lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman, maka keseimbangan lingkungan strategis DISHUB menunjukkan bahwa DISHUB masih memiliki keseimbangan yang positif, yaitu 1,78 untuk lingkungan internal dan 0,93 untuk lingkungan eksternal. Kondisi ini menyiratkan bahwa DISHUB Kabupaten Barito Kuala masih harus terus meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.



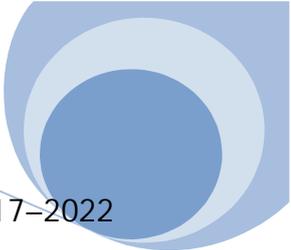
Tabel 3. 5. Matriks Keseimbangan Lingkungan Strategis
DISHUB

Indikator	Skor Tetimbang	Indikator	Skor Tertimbang
1. Kekuatan	4,65	1. Peluang	3,80
2. Kelemahan	2,87	2. Ancaman	2,87
KESEIMBANGAN	1,78	KESEIMBANGAN	0,93

Berdasarkan matriks keseimbangan lingkungan strategis DISHUB tersebut, dalam tahun 2017-2022 strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan ditempuh oleh DISHUB Kabupaten Barito Kuala diprioritaskan untuk menjaga dan memantapkan kinerja kinerja yang telah dicapai selama ini.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor xxx Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2017–2022 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2017 – 2022.



Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2017–2022 adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera”, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

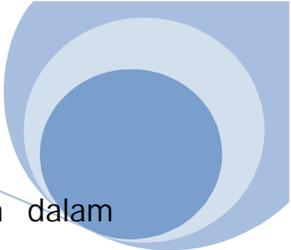
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 4 (empat) Misi yaitu :

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Perkotaan.
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian.
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumberdaya Manusia.
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra DISHUB Kabupaten Barito Kuala dengan Dokumen RPJMD 2017-2022, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja DISHUB Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan DISHUB yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, DISHUB berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Mencermati keempat misi pembangunan daerah, peran perhubungan dominan pada misi kesatu melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi yang nyaman dengan masa pakai yang panjang juga merata di wilayah Kabupaten Barito Kuala dengan konsep maju secara teknologi, hijau dengan mengurangi polusi udara sebagai akibat dari



emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kualayang terkait dengan misi tersebut yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan agar terciptanya infrastruktur transportasi yang nyaman, tahan lama, berwawasan lingkungan hijau secara merata dan berkelanjutan.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam dokumen perencanaannya mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia.
3. Peningkatan kualitas operator/penyedia jasa di transportasi darat yang memiliki kualitas prima di dalam manajemen produksi;
4. Peningkatan daya saing pelayanan transportasi darat sehingga mampu berkompetisi dengan moda lainnya;
5. Pertumbuhan pembangunan transportasi darat yang merata dan berkelanjutan
6. Penciptaan pembangunan transportasi darat yang terintegrasi dengan moda lainnya.

Adapun sasaran Kementrian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu :

- 1 Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional
2. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan per-undang-undangan/regulatoryreform) di bidang transportasi darat



dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada Masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

3. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa transportasi darat di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai
4. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa transportasi darat yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil kajian KLHS, maka permasalahan pokok pada Kabupaten Barito Kuala adalah :

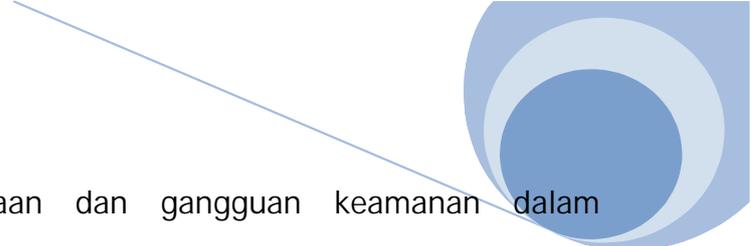
- a. Struktur ruang wilayah belum terbentuk dengan baik, sehingga rencana struktur berusaha mengangkat permasalahan pembangunan dan pertumbuhan kota-kota tidak dalam bentuk spasial.
- b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Peraturan Zonasi) belum optimal : Lahan basah yang dapat dibudidayakan untuk kegiatan pertanian/perikanan, perubahan kawasan lindung pantai (hutan mangrove) menjadi kawasan budidaya perikanan.
- c. Degradasi sungai-sungai dan kanal, menyebabkan banjir tahunan di daerah hulu (Kecamatan Kuripan), air laut hingga ke daerah hulu (pada saat musim kemarau, hingga mencemari sumber air baku), Kualitas air permukaan dengan tingkat keasaman tinggi tidak dapat digunakan sebagai air baku untuk kepentingan air bersih dan air minum.
- d. Kondisi permukaan tanah rawa, tidak memungkinkan pengolahan limbah domestic dengan baik, sehingga menyebabkan pencemaran air tanah dan permukaan.
- e. Pelayanan transportasi public masih rendah.

- 
- f. Intensitas transportasi sungai yang tinggi di alur sungai barito, khususnya transportasi angkutan batu bara berpotensi menurunkan kualitas cagar alam Pulau Bakut, Pulau Kaget dan Pulau Kembang (limbah batu bara, bbm kapal, penggerusan, pengaruh negative terhadap flora dan fauna yang di lindungi).
 - g. Kuantitas dan kualitas prasarana perkotaan masih relative rendah terutama pada persampahan, jaringan litrik, drainase, air bersih, limbah dan sanitasi.
 - h. Perlunya pengembangan dan perencanaan induk (masterplan) ekonomi pembangunan kabupaten barito kuala; untuk mengakomodasi isu globalisasi dan pasar terbuka, serta Persaingan ekonomi regional. Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang belum ada, angka pengangguran yang relative tinggi, dan potensi Kepariwisataaan belum berkembang secara optimal.
 - i. Persebaran Penduduk yang tidak merata dan Pertumbuhan Penduduk rendah, bahkan cenderung berkurang di beberapa wilayah tertinggi, terjadinya proses migrasi keluar dan urbanisasi.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perhubungan, visi, misi dan program Kepala Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perhubungan dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

- a. Kurangnya SDM berlatar belakang teknis perhubungan;
- b. Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum menyebabkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi;
- c. Rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas;
- d. Pengembangan transportasi darat yang aman, tertib, terintegrasi dan terjangkau;

- 
- e. Menurunnya angka kecelakaan dan gangguan keamanan dalam peayanan transportasi;
 - f. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan transportasi;
 - g. Pengembangan sistem pelayanan yang efisien dengan pelayanan Prima

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Perhubungan (DISHUB) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam Pekayanan Transfortasi memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Kuala yaitu: Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan DISHUB menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi daerah. Untuk itu tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak di bidang Perhubungan dan menjadi lokomotif palayanan transfortasi di Kabupaten Barito Kuala.

Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang di inginkan pada masa yang akan datang

Merujuk pada pasal 272 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Stategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Stategis dimaksud memuat Tujuan, Sasaran, Program dan sasaran Pembangunan, hal ini berarti perangkat daerah tidak diwajibkan menyusun visi dan misi perangkat daerah tetapi lebih ditujukan dan di arahkan mendukung misi daerah yang telah ditetapkan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra DISHUB Kabupaten Barito Kuala dengan Dokumen RPJMD 2017-2022, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan,



artinya indikator kinerja DISHUB Kabupaten Barito Kuala harus di arahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan DISHUB yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, DISHUB berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Mencermati keempat misi pembangunan daerah, peran perhubungan dominan pada misi Satu dengan sasaran Meningkatnya infrastruktur wilayah, prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman peran penting DISHUB dalam sasaran ini adalah untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah agar dapat terakomodasi pada dokumen perencanaan dan penganggaran.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dishub

Dinas Perhubungan Kabupaten Barito kuala Mempunyai Visi : “Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Yang Handal” dan mempunyai misi : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan untuk mengembangkan Manajemen Keselamatan Transportasi.

Dengan memperhatikan Visi, Misi tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuasla Tahun 2017-2022, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai DISHUB Kabupaten Barito Kuala dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

**TABEL IV.1 (T.C25A)
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN**

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategid Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala 2017 2022

Visi : "Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Yang Handal "								
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Pada Tahun KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
Misi : " Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan untuk mengembangkan Manajemen Keselamatan Transportasi "								
Meningkatkan pelayanan dibidang transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas jalan	Persentasi penurunan kecelakaan lalu lintas jalan	Persentase	100	100	100	100	100
	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas Sungai dan Penyeberangan	Persentasi penurunan kecelakaan lalu lintas sungai dan penyeberangan	Persentase	100	100	100	100	100

**TABEL IV.1 (T.C25B)
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN**

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategid Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala 2017 2022

Visi : "Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Handal "										
Misi : " Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan untuk mengembangkan Manajemen Keselamatan Transportasi										
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran Program	Indikator Program	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Pada Tahun KE-				
						2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan pelayanan dibidang transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas jalan	Persentasi penurunan kecelakaan lalu lintas jalan	Meningkatnya ruas jalan kabupaten dengan rambu keselamatan lengkap	Prosentasi ruas jalan kabupaten dengan rambu keselamatan lengkap	60	20	40	60	80	100
			Meningkatnya terminal layak pakai	Prosentasi sarana dan prasarana yang berfungsi sesuai dengan standart	80	20	40	60	80	100
			Meningkatnya angkutan tertib aturan	Prosentasi Angkutan tertib	65	18	37	58	79	100
	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas Sungai dan Penyeberangan	Persentasi penurunan kecelakaan lalu lintas sungai dan penyeberangan	Meningkatnya alur sungai kabupaten dengan rambu keselamatan lengkap	Prosentasi alur sungai kabupaten dengan rambu sungai lengkap	20	8	50	58	100	

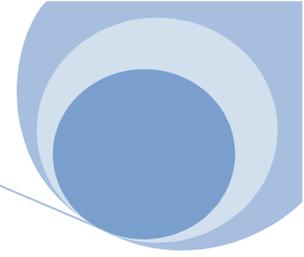
			Meningkatkan dermaga layak pakai sesuai standart	Prosentasi dermaga dan kelengkapannya yang berfungsi sesuai standart	85	14	36	64	79	100
			Meningkatkan Angkutan sungai laik jalan sesuai standart keselamatan	Prosentasi Angkutan sungai laik jalan sesuai standart keselamatan	50	20	40	60	80	100

TABEL IV.1 (T.C25C)
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategid Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala 2017 2022

Visi : "Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Yang Handal "												
Misi : " Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan untuk mengembangkan Manajemen Keselamatan Transportasi "												
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran Program	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi Awal 2017	Target Kinerja Pada Tahun KE-				
								2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan pelayanan dibidang transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas jalan	Persentasi penurunan kecelakaan lalu lintas jalan	Meningkatnya ruas jalan kabupaten dengan rambu keselamatan lengkap	Prosentasi ruas jalan kabupaten dengan rambu keselamatan lengkap	Rambu yang dipasang sesuai standar	Jumlah rambu yang dipasang sesuai standart	10.538	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
					sosialisasi keselamatan jalan	Jumlah masyarakat yang memahami aturan keselamatan jalan	80	80	80	80	80	80
			Meningkatnya terminal layak pakai	Prosentasi sarana dan prasarana yang berfungsi sesuai dengan standart	terminal yang di bangun dan pelihara	Jumlah terminal yang dibangun dan dipelihara	3	1	2	2	2	1
			Meningkatnya angkutan tertib aturan	Prosentasi Angkutan tertib	Pengawasan kelengkapan kendaraan	Jumlah kendaraan yang lengkap	200	210	220	230	240	250

					Pengawasan angkutan Jalan taat regulasi	jumlah angkutan taat regulasi	1	1	7	6	5	1	
Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas Sungai dan Penyeberangan	Persentasi penurunan kecelakaan lalu lintas sungai dan penyeberangan	Meningkatnya alur sungai kabupaten dengan rambu keselamatan lengkap	Prosentasi alur sungai kabupaten dengan rambu sungai lengkap	Rambu sungai yang dipasang sesuai standart	Jumlah rambu sungai yang dipasang sesuai standart	50	10	10	10	10	-		
				sosialisasi aturan keselamatan pelayaran	Jumlah juru mudi yang memahami aturan keselamatan pelayaran	40	-	40	-	40	-		
				Meningkatkan dermaga layak pakai sesuai standart	Prosentasi dermaga dan kelengkapannya yang berfungsi sesuai standart	Dermaga yang dipelihara	Jumlah Dermaga yang dipelihara	20	1	1	1	1	-
						dermaga yang dibangun	Jumlah dermaga yang dibangun	39	1	2	3	1	3
		Meningkatkan Angkutan sungai laik jalan sesuai standart keselamatan	Prosentasi Angkutan sungai laik jalan sesuai standart keselamatan	Pengawasan angkutan sungai	Jumlah angkutan yang taat regulasi	25	36	36	36	36	37		
				Pengawasan angkutan laik jalan	Jumlah angkutan sungai yang sesuai aturan keselamatan	25	36	36	36	36	37		



BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan SKPD, yang perlu di perhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut.

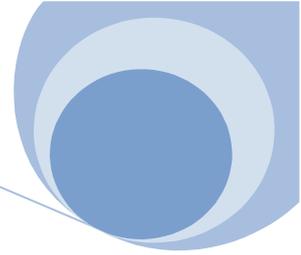
5.1. Analisa Keterkaitan Lingkungan Strategis

Analisa lingkungan internal dan eksternal tentang kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman bagi DISHUB Kabupaten Barito Kuala dalam lima tahun mendatang (2017-2022) yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dilakukan untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang paling tepat dalam peningkatan kinerja DISHUB.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja DISHUB. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, DISHUB harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja DISHUB yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakandan tujuan pembangunan Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal.

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 5. 1. Analisa Lingkungan Strategis DISHUB
Kabupaten Barito Kuala

Internal	Kekuatan /Strength : (S)	kelemahan /Weakness: (w)
	1 Tersedianya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan	1 Kurangya sarana dan prasarana
External	2 Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai	2 kurangnya sumber daya manusia Tehnis Perhubungan
peluang /Opportunities: (O)	(SO)	(WO)
1 Dukungan dari instansi terkait	1.1 Memanfaatkan ketersediaan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan untuk memperoleh dukungan dari instansi terkait	1.1 Mengefektifkan kurangnya sarana prasarana untuk memperoleh dukungan dari instansi terkait
2 Adanya peraturan yang mendukung peran DISHUB dalam pelayanan transportasi	2.2 Mengoptimalkan sarana dan prasarna yang memadai dalam peraturan yang mendukung Dishub dalam pelayanan transportasi	2.2 Mengefektifkan kurangnya sumber manusia Tehnis Perhubungan dalam peraturan yang mendukung Dishub dalam pelayanan transportasi
Ancaman / Threats: (T)	(ST)	(WT)
1 Rendahnya Dukungan dari instansi terkait	1.1 Memanfaatkan ketersediaan anggaran untuk mengatasi dukungan dari instansi terkait	1.1 Mengefektifkan kurangnya sarana prasarana untuk Meangatasi masalah dukungan dari instansi terkait
2 Meningkatnya tuntutan masyarakat akan fasilitas perhubungan	2.2 Mengoptimalkan sarana dan prasarna yang memada untuk mengatasi Masalah tuntutan masyarakat akan fasilitas perhubungan	2.2 Mengoptimalkan kurangnya sumber manusia Tehnis Perhubungan dalam mengatasi Masalah tuntutan masyarakat akan fasilitas perhubungan

Sumber: Hasil Analisis Tim, 2017

1. Keterkaitan Potensi - Peluang (S-O)

- 1) Memanfaatkan ketersediaan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan untuk memperoleh dukungan dari instansi terkait
- 2) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang memadai dalam peraturan yang mendukung Dishub dalam pelayanan transportasi

2. Keterkaitan Potensi – Ancaman (S – T)

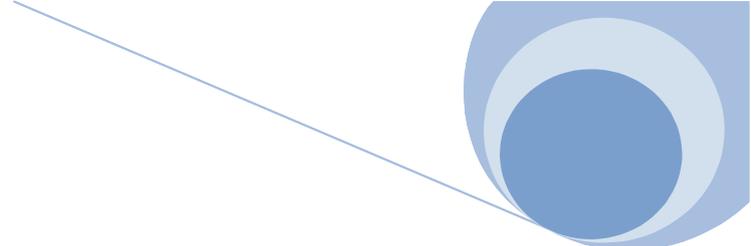
- 1) Memanfaatkan ketersediaan anggaran untuk mengatasi dukungan dari instansi terkait
- 2) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengatasi Masalah tuntutan masyarakat akan fasilitas perhubungan

3. Keterkaitan Kelemahan – Peluang (W – O)

- 1) Mengefektifkan kurangnya sarana prasarana untuk memperoleh dukungan dari instansi terkait
- 2) Mengefektifkan kurangnya sumber manusia Tehnis Perhubungan dalam peraturan yang mendukung Dishub dalam pelayanan transportasi

4. Keterkaitan Kelemahan – Peluang (W – T)

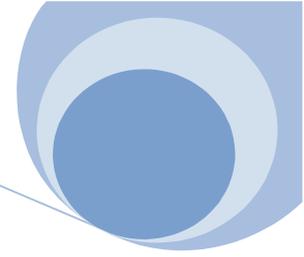
- 1) Mengefektifkan kurangnya sarana prasarana untuk mengatasi masalah dukungan dari instansi terkait
- 2) Mengoptimalkan kurangnya sumber manusia Tehnis Perhubungan dalam mengatasi Masalah tuntutan masyarakat akan fasilitas perhubungan



Data dan informasi perencanaan yang terpadu dan mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh DISHUB Tahun 2017-2022 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

TABEL.4.2 (TC.26)
Tujuan, Sasaran, strategi dan Kebijakan

"Visi : "Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi Yang Handal "			
Misi : " Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan untuk mengembangkan Manajemen Keselamatan Transportasi "			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan pelayanan dibidang transportasi	Menurunnya angka kecelakaan Lalu Lintas Jalan	Peningkatan sarana prasarana transportasi darat	pengadaan sarana prasarana dan sosialisasi peraturan transportasi darat
	Menurunnya angka kecelakaan Lalu Lintas sungai dan penyeberangan	Peningkatan sarana prasarana transportasi sungai	pengadaan sarana prasarana dan sosialisasi peraturan transportasi sungai



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, PENDANAAN

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dalam tugasnya Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala mempunyai fungsi Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, sungai dan penyeberangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

6.1 Rencana Program

Dalam rangka mendukung tercapainya RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala mempunyai 8 (delapan) program yang terdiri dari 5 (lima) Program utama dan 3 (tiga) Program Penunjang yakni sebagai berikut :

a. Program Utama:

1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan fasilitas LLAJ
2. Program peningkatan pelayanan angkutan
3. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
4. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
5. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

b. Program Penunjang :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6.2 Kegiatan

Kegiatan Merupakan penjabaran dari program yang dilaksanakan secara optimal guna mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017- 2022

Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

Tabel VI.1
Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala

Program	Kegiatan
1 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
2 Program peningkatan pelayanan angkutan	1 penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 2 Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 3 Monitoring; Evaluasi dan Pelaporan
3 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	1 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
4 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1 Pengadaan Rambu lalu lintas 2 Pengadaan Marka Jalan
5 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor 2 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyedia jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
		2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
		3	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
		4	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional
		5	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Pendidikan dan pelatihan formal

6.3 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan alat ukur keberhasilan/ tingkat capaian atas setiap kegiatan yang dilaksanakan dan dirumuskan sebagai berikut :

KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	1	Jumlah Dermaga yang dipelihara
		2	Jumlah terminal dipelihara
2	penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	1	Jumlah masyarakat yang memahami aturan keselamatan jalan
		2	Jumlah juru mudi yang memahami aturan keselamatan pelayaran
3	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	1	Jumlah kendaraan yang lengkap
		2	Jumlah angkutan sungai yang sesuai aturan keselamatan
4	Monitoring; Evaluasi dan Pelaporan	4	Jumlah dermaga yang diawasi
5	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	1	Jumlah dermaga yang dibangun
		2	Jumlah terminal yang dibangun
6	Pengadaan Rambu lalu lintas	1	Jumlah rambu yang dipasang sesuai standart
		2	Jumlah rambu sungai yang dipasang sesuai standart
7	Pengadaan Marka Jalan	1	Jumlah rambu yang dipasang sesuai standart
8	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	1	jumlah angkutan taat regulasi
9	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	1	jumlah angkutan taat regulasi
10	Penyediaan jasa surat menyurat	1	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipan kantor
11	Penyedia jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	1	Jumlah langganan listrik, PDAM, telpon

12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	1	Jumlah pajak STNK dan KIR mobil /kendaraan yang dibayar
13	Penyediaan alat tulis kantor	1	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan
14	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	1	Jumlah jenis cetakan berkas kantor
15	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1	Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung kantor
16	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	1	Jumlah penyediaan Surat kabar Harian/media cetak
17	Penyediaan makanan dan minuman	1	Jumlah porsi makan dan minum untuk harian pegawai, tamu, rapat dan kegiatan
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	Jumlah kendaraan operasional
21	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1	jumlah pembelian peralatan Gedung Kantor.
22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1	Jumlah bangunan gedung kantor yg terpelihara dan kondisi baik
23	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	1	Jumlah kendaraan dinas roda 4,roda 2, dan speed boat yang siap operasional
24	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	1	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara dan siap operasional
25	Pendidikan dan pelatihan formal	1	Jumlah PNS yang ditugaskan mengikuti Diklat dan meningkat Kompetensinya

Tabel VI.2

Tujuan Sasaran Kegiatan Utama dan Indikator Kinerja

Sasaran : Meningkatnya infrastruktur wilayah dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	
Meningkatkan pelayanan dibidang transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas jalan	Persentasi penurunan kecelakaan lalu lintas jalan	Meningkatnya ruas jalan kabupaten dengan rambu keselamatan lengkap	Prosentasi ruas jalan kabupaten dengan rambu keselamatan lengkap	Rambu yang dipasang sesuai standar	Jumlah rambu yang dipasang sesuai standart	
					sosialisasi keselamatan jalan	Jumlah masyarakat yang memahami aturan keselamatan jalan	
			Meningkatnya terminal layak pakai	Prosentasi sarana dan prasarana yang berfungsi sesuai dengan standart	terminal yang di bangun dan pelihara	Jumlah terminal yang dibangun dan dipelihara	
			Meningkatnya angkutan tertib aturan	Prosentasi Angkutan tertib	Pengawasan kelengkapan kendaraan	Jumlah kendaraan yang lengkap	
	Pengawasan angkutan Jalan taat regulasi	jumlah angkutan taat regulasi					
	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas Sungai dan Penyeberangan	Persentasi penurunan kecelakaan lalu lintas sungai dan penyeberangan	Meningkatnya alur sungai kabupaten dengan rambu keselamatan lengkap	Prosentasi alur sungai kabupaten dengan rambu sungai lengkap	Rambu sungai yang dipasang sesuai standart	Jumlah rambu sungai yang dipasang sesuai standart	
					sosialisasi aturan keselamatan pelayaran	Jumlah juru mudi yang memahami aturan keselamatan pelayaran	
				Meningkatkan dermaga layak pakai sesuai standart	Prosentasi dermaga dan kelengkapannya yang berfungsi sesuai standart	Dermaga yang dipelihara	Jumlah Dermaga yang dipelihara
						dermaga yang dibangun	Jumlah dermaga yang dibangun

			Meningkatkan Angkutan sungai laik jalan sesuai standart keselamatan	Prosentasi Angkutan sungai laik jalan sesuai standart keselamatan	Pengawasan angkutan sungai	Jumlah angkutan yang taat regulasi
					Pengawasan angkutan laik jalan	Jumlah angkutan sungai yang sesuai aturan keselamatan

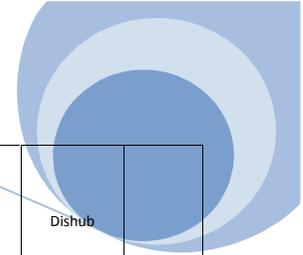
Tabel V.4

Pendanaan Indikatif Tahun Anggaran 2018 - 2022

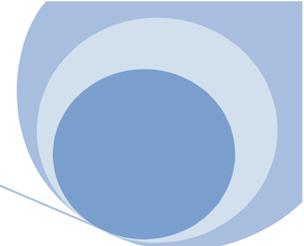
NO	PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG	PAGU ANGGARAN				
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	89.000.000	198.000.000	1.005.000.000	112.000.000	65.000.000
2	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	82.500.000	88.000.000	93.500.000	104.000.000	109.500.000
3	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	150.000.000	30.000.000	300.000.000	150.000.000	450.000.000
4	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	687.750.000	764.150.000	788.550.000	803.950.000	744.350.000
5	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	2.646.000.000	3.988.500.000	2.450.000.000	1.100.000.000	19.000.000
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	280.131.450	328.824.595	358.837.740	388.850.885	418.864.030
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	174.068.000	210.264.800	225.561.600	240.858.400	214.155.200
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000	82.500.000	90.000.000	97.500.000	105.000.000
	Jumlah	4.184.449.450	5.690.239.395	5.311.449.340	2.997.159.285	2.125.869.230

Tabel TC 27 RENCANA PROGRAM,KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 2022 (DALAM RIBUAN)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
										Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan pelayanan dibidang transportasi	Presentase peningkatan pelayanan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas jalan	Persentasi penurunan kecelakaan lalu lintas jalan	2.09.01.19	Meningkatnya ruas jalan kabupaten dengan rambu keselamatan lengkap	Prosentasi ruas jalan kabupaten dengan rambu keselamatan lengkap	Rambu yang dipasang sesuai standar	Jumlah rambu yang dipasang sesuai standart	10.538	5.540	612.750	5.540	689.150	5.540	713.550	5.540	728.950	5.540	744.350	27.700	Dishub	
							sosialisasi keselamatan jalan	Jumlah masyarakat yang memahami aturan keselamatan jalan	80	80	48000	80	49600	80	51200	80	52800	80	54400	400	Dishub	
				2.09.01.18	Meningkatnya terminal layak pakai	Prosentasi sarana dan prasarana yang berfungsi sesuai dengan standart	terminal yang di bangun dan pelihara	Jumlah terminal yang dibangun dan dipelihara	3	1	45000	2	150000	2	955000	2	60000	1	65000	8	Dishub	
				2.09.0117.02	Meningkatnya angkutan tertib aturan	Prosentasi Angkutan tertib	Pengawasan kelengkapan kendaraan	Jumlah kendaraan yang lengkap	200	210	75000	220	80000	230	85000	240	95000	250	100000	1.150	Dishub	
							Pengawasan angkutan Jalan taat regulasi	jumlah angkutan taat regulasi	1	1	264600	7	398850	6	245000	5	110000	1	19000	20	Dishub	
		Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas Sungai dan Penyeberangan	Persentasi penurunan kecelakaan lalu lintas sungai dan penyeberangan	2.09.01.19	Meningkatnya alur sungai kabupaten dengan rambu keselamatan	Prosentasi alur sungai kabupaten dengan rambu sungai lengkap	Rambu sungai yang dipasang sesuai standart	Jumlah rambu sungai yang dipasang sesuai standart	50	10	75000	10	75000	10	75000	10	75000			40	Dishub	



					an lengkap		sosialisasi aturan keselamatan pelayaran	Jumlah juru mudi yang memahami aturan keselamatan pelayaran	40		40	20000			40	25000			80	Dishub		
				2.09.01.18	Meningkatkan dermaga layak pakai sesuai standart	Prosentasi dermaga dan kelengkapan nya yang berfungsi sesuai standart	Dermaga yang dipelihara	Jumlah Dermaga yang dipelihara	20	1	44000	1	48000	1	50000	1	52000			4	Dishub	
							dermaga yang dibangun	Jumlah dermaga yang dibangun	39	1	150000	2	300000	3	300000	1	150000	3	450000	10	Dishub	
				2.09.01.17	Meningkatkan Angkutan sungai laik jalan sesuai standart keselamatan	Prosentasi Angkutan sungai laik jalan sesuai standart keselamatan	Pengawasan angkutan sungai	Jumlah angkutan yang taat regulasi	25	36	3.750	36	4.000	36	4.250	36	4.500	37	4.750	180	Dishub	
							Pengawasan angkutan laik jalan	Jumlah angkutan sungai yang sesuai aturan keselamatan	25	36	3.750	36	4.000	36	4.250	36	4.500	37	4.750	180	Dishub	
jumlah										5.915	3.703.250	5.974	5.408.250	5.944	4.688.250	5.992	2.347.750	5.948	1.442.250	29.772		



BAB VII

KINERJA DISHUB YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Didalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala. Mengingat teratnya kaitan antara Renstra DISHUB Kabupaten Barito Kuala dengan Dokumen RPJMD 2017-2022, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja DISHUB Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan DISHUB yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, DISHUB berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Mencermati keempat misi pembangunan daerah, peran perencanaan dominan pada misi keempat dengan target untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah dapat terakomodasi pada dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun secara keseluruhan ada peran perencanaan secara khusus pada tiga misi lainnya guna menjalin terjadinya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah.

Indikator Kinerja DISHUB yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel VII.1

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Misi ke 1 RPJMD : Mengintegrasikan Infrastruktur yang mendukung kemandirian Desa dan Penataan Perkotaan									
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET AWAL 2017	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN					TARGET AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan pelayanan pelayanan dibidang transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas jalan	Persentasi penurunan kecelakaan lalu lintas jalan	100	100	100	100	100	100	100
	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas Sungai dan Penyeberangan	Persentasi penurunan kecelakaan lalu lintas sungai dan penyeberangan	100	100	100	100	100	100	100

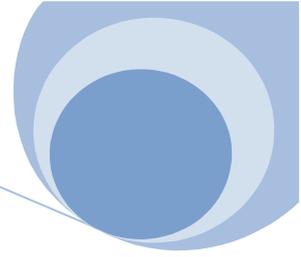
BAB VIII

PENUTUP

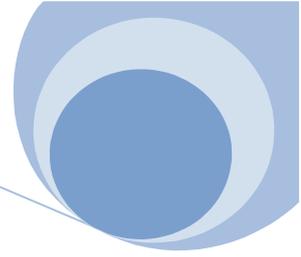
Renstra DISHUB Kabupaten Barito Kuala periode 2017-2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DISHUB untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2017-2022 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf DISHUB. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2017-2022, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan DISHUB Kabupaten Barito Kuala periode 2017-2022 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2017-2022.

Renstra DISHUB Kabupaten Barito Kuala periode 2017-2022 dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di DISHUB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Penyusunan Renstra DISHUB Kabupaten Barito Kuala pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala.

Hasil pelaksanaan Renstra DISHUB tahun 2017-2022 akan menjadi tolok ukur keberhasilan DISHUB yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Barito Kuala setiap akhir tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan



LAMPIRAN



LAMPIRAN – 1

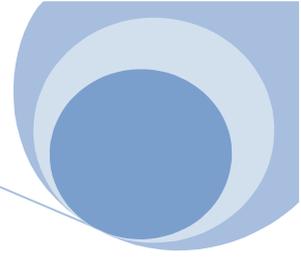
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DISHUB KABUPATEN BARITO KUALA

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB) KABUPATEN BARITO KUALA**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun KE-				
					2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan pelayanan dibidang transportasi	1. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas jalan	1. Persentasi penurunan kecelakaan lalu lintas jalan	Persentase	100	100	100	100	100
		2. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas Sungai dan Penyeberangan	2. Persentasi penurunan kecelakaan lalu lintas sungai dan penyeberangan	Persentase	100	100	100	100	100

Marabahan, 4 Juni 2018
KEPALA DINAS

Drs.H.Samsul Arifin M.AP
NIP. 1964082 198903 1015



L A M P I R A N – 2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATOR
DISHUB
KABUPATEN BARITO KUALA

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATOR
DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB) KABUPATEN BARITO KUALA

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
							Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
Meningkatkan pelayanan pelayanan dibidang transportasi	Menurunkan angka kecelakaan Lalu Lintas Jalan	Persentase penurunan angka kecelakaan Lalu Lintas Jalan			Persentase penurunan angka kecelakaan Lalu Lintas		Rp4.236.034.615	Rp7.957.540.000	Rp9.116.150.000	Rp3.032.440.000	Rp2.762.679.000	Rp27.104.843.615				
					Persentase penurunan angka kecelakaan Lalu Lintas Jalan	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Kepala	Kab. Batola		
							Rp3.496.750.000	Rp5.972.250.000	Rp8.228.650.000	Rp2.210.940.000	Rp1.150.679.000	Rp21.059.269.000				
					2.09.01.15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentasi sarana dan prasarana yang berfungsi sesuai dengan standart	100%	100%	100%	100%	100%	100%	500%	Kabid Perhubungan darat	Kab. Batola
							Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp500.000.000				
					2.09.01.15.01	Kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah perencanaan perhubungan	7%	1	1	1	1	1	500%	Kasie Keselamatan sarana dan prasarana	Kab. Batola
							Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp500.000.000				
					2.09.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prosentasi sarana dan prasarana yang berfungsi sesuai dengan standart	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabid Perhubungan darat	Kab. Batola
							Rp0	Rp40.000.000	Rp45.000.000	Rp50.000.000	Rp55.000.000	Rp190.000.000				
					2.09.01.16.04	Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah Terminal yang dipelihara	4		1	1	1	1	4	Kepala	Kab. Batola
							Rp40.000.000	Rp45.000.000	Rp50.000.000	Rp55.000.000	Rp190.000.000					
					2.09.01.17	Peningkatan Palayan Angkutan	Persentase angkutan tertib aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabid Perhubungan darat	Kab. Batola
							Rp138.000.000	Rp145.600.000	Rp214.100.000	Rp231.990.000	Rp251.329.000	Rp981.019.000				
2.09.01.17.02	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah angkutan yang lengkap	100%	200	210	220	230	240	1100	Kasie Llau Lintas Angkutan Jalan	Kab. Batola					
		Rp75.000.000	Rp80.000.000	Rp145.900.000	Rp160.490.000	Rp176.359.000	Rp637.749.000									
2.09.01.17.15	Sosialisasi Kebijakan Perhubungan	Jumlah peserta yang memahami aturan keselamatan jalan		80	80	80	80	80	400	Kasie Llau Lintas Angkutan Jalan	Kab. Batola					
		Rp48.000.000	Rp49.600.000	Rp51.200.000	Rp52.800.000	Rp54.400.000	Rp256.000.000									
2.09.01.17.17	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	Monitoring Evaluasi dan pelaporan bidang Hubdat		40	50	60	70	80	300	Kasie Llau Lintas Angkutan Jalan	Kab. Batola					
		Rp15.000.000	Rp16.000.000	Rp17.000.000	Rp18.700.000	Rp20.570.000	Rp87.270.000									
2.09.01.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Prosentasi sarana dan prasarana yang berfungsi sesuai dengan standart	100%		100%	100%			100%	Kabid Perhubungan darat	Kab. Batola					
		Rp1.000.000.000	Rp900.000.000				Rp1.900.000.000									

LAMPIRAN 2

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi					
							Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra							
							Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu							
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15					
Meningkatkan pelayanan dibidang transportasi	Menurunkan angka kecelakaan Lalu Lintas Jalan	Persentase penurunan angka kecelakaan Lalu Lintas Jalan			Persentase penurunan angka kecelakaan Lalu Lintas		Rp4.236.034.615	Rp7.957.540.000	Rp9.116.150.000	Rp3.032.440.000	Rp2.762.679.000	Rp27.104.843.615	Kepala	Kab. Batola					
					Persentase penurunan angka kecelakaan Lalu Lintas Jalan		100%	20%	40%	60%	80%	100%			100%				
								Rp3.496.750.000	Rp5.972.250.000	Rp8.228.650.000	Rp2.210.940.000	Rp1.150.679.000			Rp21.059.269.000				
					2.09.01.15.		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi sesuai dengan standart	100%	100%	100%	100%			100%	100%	500%	Kabid Perhubungan darat	Kab. Batola
								Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000			Rp500.000.000				
					2.09.01.15.01		Kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah perencanaan perhubungan	7%	1	1	1			1	1	500%	Kasie Keselamatan sarana dan prasarana	Kab. Batola
								Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000			Rp500.000.000				
					2.09.01.16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi sesuai dengan standart	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	Kabid Perhubungan darat	Kab. Batola
								Rp0	Rp40.000.000	Rp45.000.000	Rp50.000.000	Rp55.000.000			Rp190.000.000				
					2.09.01.16.04		Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah Terminal yang dipelihara	4		1	1			1	1	4	Kepala	Kab. Batola
								Rp40.000.000	Rp45.000.000	Rp50.000.000	Rp55.000.000	Rp190.000.000							
					2.09.01.17		Peningkatan Palayan Angkutan	Persentase angkutan tertib aturan	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	Kabid Perhubungan darat	Kab. Batola
		Rp138.000.000	Rp145.600.000	Rp214.100.000	Rp231.990.000	Rp251.329.000	Rp981.019.000												
2.09.01.17.02	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah angkutan yang lengkap	100%	200	210	220	230	240	1100	Kasie Liau Lintas Angkutan Jalan	Kab. Batola								
		Rp75.000.000	Rp80.000.000	Rp145.900.000	Rp160.490.000	Rp176.359.000	Rp637.749.000												
2.09.01.17.15	Sosialisasi Kebijakan Perhubungan	Jumlah peserta yang memahami aturan keselamatan jalan		80	80	80	80	80	400	Kasie Liau Lintas Angkutan Jalan	Kab. Batola								
		Rp48.000.000	Rp49.600.000	Rp51.200.000	Rp52.800.000	Rp54.400.000	Rp256.000.000												
2.09.01.17.17	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	Monitoring Evaluasi dan pelaporan bidang Hubdat		40	50	60	70	80	300	Kasie Liau Lintas Angkutan Jalan	Kab. Batola								
		Rp15.000.000	Rp16.000.000	Rp17.000.000	Rp18.700.000	Rp20.570.000	Rp87.270.000												
2.09.01.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi sesuai dengan standart	100%		100%	100%			100%	Kabid Perhubungan darat	Kab. Batola								
				Rp1.000.000.000	Rp900.000.000				Rp1.900.000.000										

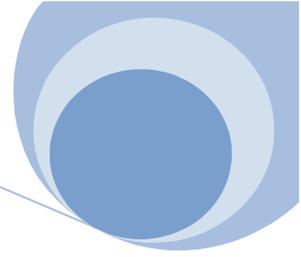
LAMPIRAN 2

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	
			2.09.01.17	Peningkatan Palayan Angkutan	Persentase angkutan taat regulasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabid Perhubungan Laut Sungai dan Penyeberangan	Kab. Batola	
							Rp30.000.000	Rp52.500.000	Rp34.500.000	Rp59.500.000	Rp34.500.000	Rp211.000.000			
			2.09.01.17.01	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah peserta yang memahami aturan keselamatan	7		40		40	0	80	Kasie Llau Lintas Angkutan Laut sungai dan penyeberangan	Kab. Batola	
								Rp20.000.000		Rp25.000.000	Rp0	Rp45.000.000			
			2.09.01.17.02	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah angkutan sungai yang sesuai aturan keselamatan	140	140	142	145	145	148	720	Kasie Llau Lintas Angkutan Laut sungai dan penyeberangan	Kab. Batola	
							Rp15.000.000	Rp17.500.000	Rp17.500.000	Rp17.500.000	Rp17.500.000	Rp85.000.000			
			2.09.01.17.17	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	Jumlah dermaga yang diawasi	7	9	9	9	9	9	45	Kasie Llau Lintas Angkutan Laut sungai dan penyeberangan	Kab. Batola	
							Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp17.000.000	Rp17.000.000	Rp17.000.000	Rp81.000.000			
			2.09.01.18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentasi Dermaga layak pakai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabid Perhubungan Laut Sungai dan Penyeberangan	Kab. Batola	
							Rp150.000.000	Rp550.000.000	Rp400.000.000	Rp250.000.000	Rp1.000.000.000	Rp2.350.000.000			
			2.09.01.18.02	Pembangunan Halle, bus,taxi gedung terminal	Jumlah Dermaga yang dibangun	39	1	2	2	1	1	7	Kasie Keselamatan sarana dan prasarana	Kab. Batola	
							Rp150.000.000	Rp550.000.000	Rp400.000.000	Rp250.000.000	Rp1.000.000.000	Rp2.350.000.000			
			2.09.01.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Prosentasi alur sungai kabupaten dengan rambu sungai lengkap	100%				100%	100%	100%	Kabid Perhubungan Laut Sungai dan Penyeberangan	Kab. Batola	
										Rp140.000.000	Rp70.000.000	Rp210.000.000			
			2.09.01.19.01	Pengadaan Rambu Lalu lintas	Jumlah rambu sungai yang dipasang sesuai standart	43				20	10	30	Kasie Keselamatan sarana dan prasarana	Kab. Batola	
										Rp140.000.000	Rp70.000.000	Rp210.000.000			
JUMLAH PAGU PROGRAM / KEGIATAN (RENSTRA 2017-2022)								Rp4.236.034.615	Rp7.957.540.000	Rp9.116.150.000	Rp3.032.440.000	Rp2.762.679.000	Rp27.104.843.615		

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
							Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG RENSTRA 2017 - 2022						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala	Kab. Batola
			2.09.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya optimalisasi pelayanan perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretaris	Kab. Batola
			2.09.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipan kantor	75	53	75	75	75	75	353	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kab. Batola
			2.09.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan listrik, PDAM, telpon	75	53	75	75	75	75	353	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kab. Batola
			2.09.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak STNK dan KIR mobil /kendaraan yang dibayar	75	53	75	75	75	75	353	Kasubbag. Perencanaan Keuangan dan Aset	Kab. Batola
			2.09.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	75	53	75	75	75	75	353	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kab. Batola
			2.09.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Untuk Kantor Selama 12 Bulan (Jenis)	75	53	75	75	75	75	353	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kab. Batola
			2.09.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Persediaan alat listrik dan penerangan bangunan kantor Selama 12 Bulan (Jenis)	75	53	75	75	75	75	353	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kab. Batola
			2.09.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Berlangganan Koran Sebanyak 2 SKH x 12 bulan (eksamplar)	75	53	75	75	75	75	353	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kab. Batola
			2.09.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Minum dan Snack Harian, Makan Minum Rapat Staf dan SKPD (Porsi)	6884	6884	6900	7000	7100	7200	35084	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kab. Batola
			2.09.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Terkait Tupoksi DISHUB Dalam Provinsi dan Luar Provinsi (Laporan)	7	9	10	11	12	13	55	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kab. Batola
			2.09.01.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Terkait Tupoksi DISHUB (Laporan)	30		35	37	39	42	153	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kab. Batola
								Rp20.000.000	Rp22.000.000	Rp24.000.000	Rp26.000.000	Rp92.000.000		

LAMPIRAN 2

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
							Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
			2.09.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Sekretaris	Kab. Batola
							422.068.000	489.598.000	567.694.800	395.791.600	381.888.400	1.619.040.800		
			2.09.01.02.03	Pengadaan gedung kantor	Pengadaan gedung kantor (Buah)	8	1	1	1	0	0	3	Kasubbag. Perencanaan Keuangan dan Aset	Kab. Batola
							Rp120.000.000	Rp150.000.000	Rp200.000.000			Rp470.000.000		
			2.09.01.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas/operasional (Buah)	8	1	2	2	2	0	7	Kasubbag. Perencanaan Keuangan dan Aset	Kab. Batola
							Rp21.100.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000		Rp147.100.000		
			2.09.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor (buah)	75	4	6	8	10	10	38	Kasubbag. Perencanaan Keuangan dan Aset	Kab. Batola
							Rp28.000.000	Rp30.800.000	Rp33.600.000	Rp36.400.000	Rp39.200.000	Rp168.000.000		
			2.09.01.02.22	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Kebersihan Gedung Kantor (pencetakan pagar (Meter Persegi)	75	53	75	75	75	75	353	Kasubbag. Perencanaan Keuangan dan Aset	Kab. Batola
							146.788.000	150.000.000	164.678.800	179.357.600	194.036.400	Rp834.860.800		
			2.09.01.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 /4 (Buah)	13	14	16	18	18	18	84	Kasubbag. Perencanaan Keuangan dan Aset	Kab. Batola
							93.880.000	103.268.000	112.656.000	122.044.000	131.432.000	Rp563.280.000		
			2.09.01.02.28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (Buah)	40	44	45	46	48	49	50	Kasubbag. Perencanaan Keuangan dan Aset	Kab. Batola
							12.300.000	13.530.000	14.760.000	15.990.000	17.220.000	Rp73.800.000		
			2.09.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase aparatur yang yg mengikuti diklat/bintek	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Sekretaris	Kab. Batola
							Rp75.000.000	Rp82.500.000	Rp90.000.000	Rp97.500.000	Rp105.000.000	Rp450.000.000		
			2.09.02.05.02	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang ditugaskan mengikuti Diklat dan tingkat Kompetensinya	5	6	6	6	7	7	32	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kab. Batola
							Rp75.000.000	Rp82.500.000	Rp90.000.000	Rp97.500.000	Rp105.000.000	Rp450.000.000		
			2.09.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Tersedianya data / informasi hasil-hasil pembangunan	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Sekretaris	Kab. Batola
							Rp15.000.000	Rp16.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0		
			2.09.01.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah	Pameran Pembangunan Daerah Oleh DISHUB (Kali)	1	1	1	1	1	1	5	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Kab. Batola
							Rp15.000.000	Rp16.500.000						
JUMLAH PAGU PROGRAM / KEGIATAN (PENDUKUNG RENSTRA 2017-2022)							Rp792.199.450	Rp917.422.595	Rp1.016.532.540	Rp882.142.485	Rp905.752.430	Rp3.844.549.500		
JUMLAH PAGU PROGRAM / KEGIATAN (DISHUB 2017-2022)							Rp5.028.234.065	Rp8.874.962.595	Rp10.132.682.540	Rp3.914.582.485	Rp3.668.431.430	Rp30.949.393.115		



LAMP IRAN – 3

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DISHUB KABUPATEN BARITO KUALA

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB) KABUPATEN BARITO KUALA

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas Sungai dan penyeberangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Marabahan, 4 Juni 2018
KEPALA DINAS

Drs.H Samsul Arifin M.AP
NIP. 19590127 198503 1 009